

**PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PAJAK, MOTIVASI PAJAK, DAN INSENTIF
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
DI KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DIY**

¹⁾Muhammad Arifudin, ²⁾Diana Airawaty

^{1, 2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

E-mail: muhammadarifudin86@gmail.com

Abstract

This study was conducted to determine the influence of perceptions of tax corruption, tax motivation, and tax incentives on taxpayer compliance among MSMEs in Bantul Regency, Yogyakarta Special Region (DIY). The population in this study was all MSMEs, both individuals and corporations, that already have a Taxpayer Identification Number (NPWP) in Bantul Regency. Data analysis used SPSS. The SPSS output shows that perceptions of tax corruption have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. Tax motivation has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. Tax incentives have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. The provision of tax incentives can increase taxpayer awareness and compliance, especially among MSMEs. The results indicate that the hypothesis is accepted.

Keywords: *tax corruption, tax motivation, tax incentives, and taxpayer compliance*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan Indonesia yang progresif dan merata (Mukoffi et al., 2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, penerimaan pajak menyumbang sekitar 80,32% dari total pendapatan negara, menjadikannya komponen terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya berkontribusi sebesar 19,56%, dan hibah sebesar 0,12%. Inilah yang membuat pemerintah Indonesia cukup bergantung pada penerimaan pajak (Maisyarah, 2024).

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat dibutuhkan karena mayoritas pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak. Artinya jika kepatuhan wajib pajak rendah, maka pendapatan negara pun ikut menurun yang juga dapat menghambat perkembangan negara dalam berbagai bidang dikarenakan kurangnya dana untuk pembangunan (Henriette & Erasashanti, 2023). Dengan meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah dapat mengurangi defisit APBN dan menghindari penambahan utang yang dapat membebani perekonomian negara di masa depan (Richard & Lastanti, 2024).

Sampai saat ini isu tentang kepatuhan wajib pajak masih menjadi momok masalah serius bagi pemerintah, tidak hanya di Indonesia namun juga seluruh dunia (Gultom & Oktris, 2022). Kepatuhan wajib pajak memainkan peran krusial dalam mencapai target penerimaan pajak. Oleh karena itu, meningkatkan kepatuhan pajak sepatutnya menjadi prioritas utama bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Alfian et al., 2025).

Pada masa sekarang ini UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah, walaupun usaha mandiri masyarakat ini hanya berupa usaha kecil tetapi cukup berpengaruh pada perputaran roda ekonomi Indonesia (Yanti & Wijaya, 2023). Kegiatan usaha ini dijalankan oleh individu maupun badan usaha yang bersifat produktif dan memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja

(Airawaty et. al., 2025). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan industri yang berkembang di Indonesia dengan potensi penerimaan pajak yang signifikan (Ratnawati et al., 2023). Ironisnya, perkembangan pesat ini tidak diikuti oleh kepatuhan wajib pajak UMKM (Tahar et al., 2023).

Tabel 1. Jumlah UMKM di DIY Tahun 2024

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM
1.	Bantul	93.846
2.	Sleman	88.999
3.	Kulon Progo	38.193
4.	Gunungkidul	58.806
5.	Kota Yogyakarta	42.191
6.	KTP luar DIY namun memiliki usaha di DIY	23.945

Sumber: 1 (Bapperida, 2024)

Kabupaten Bantul memiliki jumlah UMKM tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menurut data (Bapperida, 2024) di atas. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan tingkat kepatuhan pajak yang optimal. Hal ini tercermin dari data jumlah Wajib Pajak UMKM dengan Wajib Pajak UMKM yang melaporkan SPT, terlihat adanya ketidakseimbangan yang cukup signifikan.

Tabel 2. Data Jumlah Wajib Pajak UMKM dan SPT Tahunan WP UMKM

No.	Tahun	Jumlah WP UMKM	Jumlah Laporan SPT
1.	2021	12.920	5.291
2.	2022	13.831	4.767
3.	2023	18.548	5.147
4.	2024	24.940	4.856

Sumber: 2 KPP Kabupaten Bantul, 2025

Ketidakesesuaian antara jumlah wajib pajak dan wajib pajak yang melapor SPT tersebut menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, khususnya di sektor UMKM. Di mana UMKM di Indonesia telah terbukti memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, khususnya dalam hal peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan, serta peningkatan ekspor non-migas (Rahmawati et. al., 2023). Oleh karena itu, peningkatan kontribusi penerimaan pajak oleh wajib pajak sangat diharapkan, khususnya para pelaku UMKM.

Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak dengan metode *self-assessment*, di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar, serta melaporkan pajak yang terutang kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Simanjuntak et al., 2025). Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat diperlukan dalam sistem ini. Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

Dalam beberapa tahun terakhir, para wajib pajak semakin berhati-hati dalam membayar pajak mereka akibat beberapa kasus korupsi yang melibatkan pegawai pajak terkait pengelolaan hasil pajak. Situasi ini menyebabkan masyarakat merasa kurang percaya untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dan memperkuat persepsi negatif tentang korupsi di kalangan pegawai pajak (Lestari et al., 2023). Maraknya kasus korupsi tersebut dapat memunculkan pandangan negatif dari wajib pajak terhadap pegawai pajak, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan

ketidakpatuhan dalam hal pembayaran maupun pelaporan pajak di masa mendatang (Sari et al., 2023).

Motivasi merupakan faktor penting yang mendorong individu melaksanakan suatu aktivitas, termasuk membayar pajak, guna mencapai tujuan perpajakan (Sari et al., 2023). Motivasi yang tinggi dari Wajib Pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Safitri & Afiqoh, 2023). Semakin tinggi motivasi masyarakat dalam membayar pajak, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan mereka sebagai wajib pajak (Parengkuan & Nursyirwan, 2023).

Faktor eksternal, seperti insentif pajak, juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak bertujuan meringankan beban pajak dan mendorong pelaku usaha serta individu untuk bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat (Deyganto, 2022). Pemerintah menetapkan insentif melalui kebijakan, seperti tarif khusus 0,5% bagi wajib pajak berpenghasilan hingga Rp 4,8 miliar (PP No. 23/2018) telah diperbarui dengan PP No. 55/2022. Selama pandemi COVID-19, PP No. 55/2022 memberikan keringanan bagi UMKM berpenghasilan di bawah Rp 500 juta per tahun (nihil pajak). Kebijakan ini diharapkan mampu menjadi pendorong bagi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Andreansyah & Farina, 2022).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Herlina & Rodiah, 2024); (Friscayuarisanti et al., 2023); dan (Kusnadi et al., 2023) menyebutkan bahwa variabel persepsi korupsi pajak, motivasi pajak, dan insentif pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Diningsih et al., 2023); (Wadi & Akbar, 2024); dan (Risa et al., 2023) menyebutkan bahwa variabel persepsi korupsi pajak, motivasi pajak, dan insentif pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan objek penelitian pelaku UMKM yang sudah memiliki NPWP di Kabupaten Bantul. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang mengandalkan data berupa angka serta menggunakan metode analisis statistik untuk menguji hipotesis, menyimpulkan hasil, dan memahami keterkaitan antar variabel yang diteliti (Susanto et al., 2024). Adapun dalam penelitian ini dilakukan analisis tentang pengaruh persepsi korupsi pajak, motivasi pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari penyebaran kuisioner kepada seluruh pelaku UMKM yang sudah memiliki NPWP di Kabupaten Bantul. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, misalnya melalui wawancara, survei, eksperimen, dan metode sejenis lainnya (Rosini, 2023).

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui pendekatan kuisioner, Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Romdona et al., 2025). Jenis kuisioner yang digunakan peneliti adalah kuisioner tertutup yaitu kuisioner yang sudah disediakan jawabannya. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dengan skala Likert untuk mengukur persepsi, sikap, atau tingkat kesetujuan responden terhadap pernyataan yang berkaitan dengan variabel

penelitian. Skala likert yang digunakan untuk mengukur jawaban memiliki lima kategori sebagai berikut:

Tabel 3. Bobot dan Kategori Skala Likert

No.	Jenis Jawaban	Bobot
1.	SS = Sangat Setuju	5
2.	S = Setuju	4
3.	RR = Ragu – ragu	3
4.	TS = Tidak Setuju	2
5.	STS = Sangat Tidak Setuju	1

Populasi dan Sampel

Populasi merujuk pada kumpulan umum dari objek atau subjek yang memiliki karakteristik atau kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Ini mencakup semua unit penelitian atau analisis yang akan menjadi fokus penelitian (Tahir et al., 2023). Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pelaku UMKM baik orang pribadi ataupun badan yang sudah memiliki NPWP di Kabupaten Bantul.

Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti secara mendalam, di mana karakteristik dari unit-unit tersebut menjadi objek pengamatan atau analisis (Tahir et al., 2023). Dalam pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan *simple random sampling* sebagai teknik sampel. Teknik tersebut masuk ke dalam teknik *probability sampling* di mana pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi (Hermawan & Hariyanto, 2022). Probability sampling adalah metode pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai bagian dari sampel. (Tahir et al., 2023). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah minimum sampel dari populasi.

Keterangan:

n = Jumlah elemen atau anggota sampel

N = Jumlah elemen atau anggota populasi

e = error level atau tingkat kesalahan, dalam penelitian ini 0,1

Definsi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan penjabaran makna dari suatu konstruk atau variabel dengan tujuan untuk memberikan kejelasan, merinci aktivitas yang diperlukan, atau menetapkan tindakan yang dibutuhkan agar konstruk atau variabel tersebut dapat diukur secara konkret (Hermawan & Hariyanto, 2022).

Metode Analisis

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah proses mengumpulkan, mengorganisasi, merangkum, dan menyajikan data dengan tujuan agar informasi yang dihasilkan menjadi lebih informatif, mudah dibaca, serta mudah dipahami oleh pihak yang membutuhkan data tersebut (Tahir et al., 2023). Statistik deskriptif berperan dalam memberikan gambaran tentang data setelah pengolahan, dengan menunjukkan nilai rata-rata, standar deviasi, serta nilai maksimum dan minimum dari setiap variabel.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur mampu mengukur apa yang hendak diukur. Alat ukur dalam hal ini adalah kuisioner yang disebar kepada responden untuk mengungkap sesuatu. Jadi, pengujian validitas dilakukan pada kuesioner yang digunakan

untuk mengukur setiap pertanyaan dalam penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dinyatakan valid.

Dalam uji validitas ini, peneliti menggunakan metode korelasi *Pearson (bivariate correlation)* untuk mengukur hubungan antara setiap item dalam kuesioner dengan skor totalnya. Selanjutnya, pengujian signifikansi dilakukan dengan uji dua sisi. Jika nilai korelasi positif dan $r_{hitung} \geq r_{tabel}$, item dianggap valid. Sebaliknya, jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$, item dinyatakan tidak valid (Susilowati, 2022).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas mengukur sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten. Prinsip reliabilitas adalah memastikan hasil yang sama jika pengukuran dilakukan berulang kali pada waktu berbeda. Suatu kuesioner disebut reliabel apabila jawaban-jawaban responden konsisten. Reliabilitas dapat diuji dengan mengulangi pertanyaan serupa pada nomor berbeda, atau dengan menilai konsistensinya melalui korelasi dengan pertanyaan lain (Susilowati, 2022).

Dalam uji reliabilitas, peneliti menggunakan *Cronbach Alpha* untuk mengukur konsistensi internal suatu instrumen, seperti kuesioner, dengan menilai sejauh mana item-item dalam instrumen tersebut saling berkorelasi. Metode pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas biasanya menggunakan batas nilai 0,6. Nilai reliabilitas di bawah 0,6 dianggap kurang baik, nilai 0,7 dianggap cukup atau dapat diterima, dan nilai di atas 0,8 menunjukkan tingkat reliabilitas yang baik (Sufri & Pasaribu, 2023).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji statistik yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu sampel data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak (Candra & Wafa, 2023). Dalam penelitian ini, digunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* untuk menguji normalitas data. Data dianggap berdistribusi normal jika nilai signifikansi (sig) $> 0,5$.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah uji statistik yang digunakan untuk menilai apakah terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara dua atau lebih variabel predictor (independent) dalam model regresi linear (Candra & Wafa, 2023).

Multikolinearitas dapat dilihat dari *variance inflation factor (VIF)* dan uji toleransi. Semakin tinggi nilai VIF, semakin besar tingkat multikolinearitas dalam model. Sementara itu, semakin rendah nilai tolerance, semakin tinggi tingkat multikolinearitas antara variabel independen. Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai tolerance dan VIF adalah: jika nilai tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 , maka tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen. Sebaliknya, jika nilai tolerance $\leq 0,10$ dan nilai VIF ≥ 10 , maka dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji statistik yang digunakan untuk menilai apakah varian atau deviasi kesalahan model regresi (residual) tidak tetap atau tidak homogen di seluruh rentang nilai predictor (Candra & Wafa, 2023). Dalam konteks regresi, tidak terjadinya heteroskedastisitas adalah model regresi yang baik.

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan uji Glejser. Uji ini meregresikan variabel independen dengan nilai residual absolut. Jika nilai $p > 0,05$, maka variabel-variabel dalam penelitian ini dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesa

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah metode analisis yang melibatkan lebih dari satu variabel independen untuk mengevaluasi hubungan dan pengaruhnya terhadap variabel dependen (Sufri & Pasaribu, 2023). Dalam penelitian ini, analisis regresi berganda digunakan untuk menentukan apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Berikut adalah persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Y^1 = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y^1 = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

b_0 = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien

X_1 = Persepsi Korupsi Pajak

X_2 = Motivasi Pajak

X_3 = Insentif Pajak

e = Error

Uji t

Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pada penelitian ini digunakan 5% (0,05) sebagai nilai signifikansi. Kriteria dalam pengujian ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan Nilai Signifikansi:

- Jika nilai sig. $\leq \alpha/\alpha$, maka H_0 ditolak. Artinya, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai sig. $> \alpha/\alpha$, maka H_0 gagal ditolak. Artinya, variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2. Berdasarkan Nilai t-hitung dan t-tabel:

- Jika t-hitung $>$ t-tabel, maka H_0 ditolak. Artinya, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika t-hitung $\leq$ t-tabel, maka H_0 gagal ditolak. Artinya, variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak UMKM yang telah memiliki NPWP di Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angket online melalui google form. Penyebaran angket dilakukan mulai dari 5 September 2025 sampai dengan 15 Oktober 2025. Penyebaran angket berjumlah 121, dari jumlah data tersebut sebesar 17 tidak dapat diolah karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagai responden. Sehingga data yang dapat diolah sebesar 104, dari angket yang telah kebalikan nantinya akan diolah untuk diuji dan dianalisis.

Karakteristik Responden

1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4. Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Perempuan	51	51%
2.	Laki - laki	49	49%

Total	100	100%
-------	-----	------

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 51 orang (51%), sementara responden laki – laki berjumlah 49 orang (49%). Dari data tersebut responden didominasi oleh perempuan, namun hanya memiliki selisih sedikit dengan laki – laki yaitu sebesar 2%.

2. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir

Tabel 5. Pendidikan Terakhir Responden

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1.	SD	1	1%
2.	SMP	1	1%
3.	SMA	44	44%
4.	Diploma	19	19%
5.	S1	35	35%
Total		100	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah responden didominasi dengan Pendidikan terakhir SMA berjumlah 44 responden (44%), kemudian disusul responden dengan Pendidikan S1 dengan jumlah 35 responden (35%), Diploma 19 responden (19%) dan responden dengan pendidikan terakhir SD dan SMP masing – masing 1 responden.

3. Karakteristik responden berdasarkan kepemilikan NPWP

Tabel 6. Kepemilikan NPWP Oleh Responden

No.	Memiliki NPWP	Jumlah	Persentase
1.	YA	100	100%
2.	TIDAK	0	0%
Total		100	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan data di atas, seluruh responden telah memiliki NPWP. Tentunya data tersebut setelah dilakukan penyaringan terhadap responden yang tidak memiliki NPWP dari 121 responden.

4. Karakteristik responden berdasarkan bentuk usaha

Tabel 7. Bentuk Usaha Responden

No.	Bentuk Usaha	Jumlah	Persentase
1.	Orang Pribadi	74	74%
2.	Badan	26	26%
Total		100	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan data di atas, responden dengan bentuk usaha orang pribadi mendominasi dengan jumlah 74 responden (74%). Sementara responden dengan bentuk usaha badan berjumlah 26 responden (26%).

5. Karakteristik responden berdasarkan domisili Kabupaten Bantul

Tabel 8. Domisili Responden Berdasarkan Kabupaten

No.	Domsili Kab. Bantul	Jumlah	Persentase
1.	YA	100	100%
2.	TIDAK	0	0%
Total		100	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan data di atas, seluruh responden berdomisili di Kabupaten Bantul.

6. Karakteristik responden berdasarkan domisili Kapanewon/ Kecamatan

Tabel 9. Domisili Responden Berdasarkan Kapanewon

No.	Kapanewon/ Kecamatan	Jumlah	Persentase
1.	Pajangan	7	7%
2.	Dlingo	4	4%
3.	Pandak	4	4%
4.	Bantul	36	36%
5.	Kasihan	4	4%
6.	Bambanglipuro	9	9%
7.	Kretek	8	8%
8.	Srandakan	5	5%
9.	Sedayu	3	3%
10.	Banguntapan	3	3%
11.	Imogiri	7	7%
12.	Sewon	1	1%
13.	Pundong	3	3%
14.	Jetis	3	3%
15.	Pleret	2	2%
16.	Piyungan	1	1%
17.	Sanden	0	0%
Total		100	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan data di atas, Kapanewon Bantul menjadi wilayah dengan jumlah responden terbanyak, yaitu sebanyak 36 responden (36%) dari total responden. Disusul oleh Bambanglipuro dengan 9 responden (9%) dan Kretek dengan 8 responden (8%). Pajangan dan Imogiri masing-masing berjumlah 7 responden (7%). Srandakan 5 responden (5%), sedangkan Dlingo, Pandak, dan Kasihan masing-masing berjumlah 4 responden (4%). Beberapa wilayah seperti Sedayu, Banguntapan, Pundong, dan Jetis masing-masing memiliki 3 responden (3%), sementara Pleret hanya berjumlah 2 responden (2%). Wilayah dengan partisipasi paling rendah adalah Sewon dan Piyungan, masing-masing hanya 1 responden (1%). Adapun Sanden tidak terdapat responden sama sekali (0%).

Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan agar dapat memberikan informasi yang bermakna. Melalui analisis data, peneliti dapat mendeskripsikan, menafsirkan, serta menarik kesimpulan dari hasil penyebaran kuesioner yang telah diisi oleh responden. Pada penelitian ini, analisis data

dilakukan secara deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menggambarkan karakteristik responden dan hasil jawaban berdasarkan angka-angka yang diperoleh dari kuesioner. Selain itu, analisis data juga berfungsi untuk menguji hubungan antar variabel penelitian melalui pengolahan data statistik dengan bantuan perangkat lunak yang relevan, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar dalam pembahasan dan penarikan kesimpulan penelitian.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{24.940}{1 + 24.940(0,1)^2}$$

$$n = 99,6 \text{ (Dibulatkan menjadi 100)}$$

Maka jumlah sampel minimal yang diperlukan dari perhitungan menggunakan rumus slovin tersebut adalah 100 responden.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 10 Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Standard Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	100	13	25	18,39	2,719
Persepsi Korupsi Pajak	100	7	20	13,56	2,837
Motivasi Pajak	100	11	25	18,56	3,696
Insentif Pajak	100	5	25	19,15	4,009

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, analisis statistik deskriptif dilakukan terhadap empat variabel penelitian, yaitu Persepsi Korupsi, Motivasi Pajak, Insentif Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Analisis ini meliputi nilai minimum, maksimum, mean (rata-rata), dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil perhitungan, variabel kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai minimum sebesar 13 dan nilai maksimum sebesar 25. Nilai rata-rata (mean) sebesar 18,39 dengan standar deviasi 2,719. Nilai rata-rata yang tinggi dan standar deviasi yang kecil menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat kepatuhan pajak yang baik dan relatif merata.

2. Persepsi Korupsi Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan, variabel persepsi korupsi memiliki nilai minimum sebesar 7 dan nilai maksimum sebesar 20. Nilai rata-rata (mean) sebesar 13,56 dengan standar deviasi 2,837. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat persepsi korupsi yang relatif sedang, artinya sebagian besar wajib pajak memiliki pandangan yang cukup netral terhadap adanya praktik korupsi dalam sistem perpajakan..

3. Motivasi Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan, variabel motivasi pajak memiliki nilai minimum sebesar 11 dan nilai maksimum sebesar 25. Nilai rata-rata (mean) sebesar 18,56 dengan standar deviasi 3,696. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki motivasi pajak yang

tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakan, karena nilai rata-rata mendekati skor maksimum dan standar deviasi relatif kecil yang menandakan penyebaran data yang baik.

4. Insentif Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan, variabel insentif pajak memiliki nilai minimum sebesar 5 dan nilai maksimum sebesar 25. Nilai rata-rata (mean) sebesar 19,15 dengan standar deviasi 4,009. Nilai rata-rata yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai insentif pajak telah berjalan baik dan dapat mendorong kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Dalam uji validitas ini, peneliti menggunakan metode korelasi *Pearson (bivariate correlation)* untuk mengukur hubungan antara setiap item dalam kuesioner dengan skor totalnya. Selanjutnya, pengujian signifikansi dilakukan dengan uji dua sisi. Jika nilai korelasi positif dan $r_{hitung} \geq r_{tabel}$, item dianggap valid. Sebaliknya, jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$, item dinyatakan tidak valid (Susilowati, 2022).

Tabel 11. Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen Penelitian	R hitung	R tabel (df=98)	Keterangan
Persepsi Korupsi Pajak	Item 1	0,416	0,196	Valid
	Item 2	0,436	0,196	Valid
	Item 3	0,464	0,196	Valid
	Item 4	0,414	0,196	Valid
Motivasi Pajak	Item 1	0,340	0,196	Valid
	Item 2	0,511	0,196	Valid
	Item 3	0,413	0,196	Valid
	Item 4	0,479	0,196	Valid
	Item 5	0,425	0,196	Valid
Insentif Pajak	Item 1	0,576	0,196	Valid
	Item 2	0,648	0,196	Valid
	Item 3	0,629	0,196	Valid
	Item 4	0,703	0,196	Valid
	Item 5	0,661	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Item 1	0,796	0,196	Valid
	Item 2	0,728	0,196	Valid
	Item 3	0,672	0,196	Valid
	Item 4	0,725	0,196	Valid
	Item 5	0,781	0,196	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel uji validitas di atas, seluruh item pernyataan pada r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} yakni 0,196. Maka dapat dinyatakan seluruh item pernyataan dalam penelitian ini adalah valid.

Uji Reliabilitas

Dalam uji reliabilitas, peneliti menggunakan *Cronbach Alpha* untuk mengukur konsistensi internal suatu instrumen, seperti kuesioner, dengan menilai sejauh mana item-item

dalam instrumen tersebut saling berkorelasi. Metode pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas biasanya menggunakan batas nilai 0,6.

Tabel 12. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Persepsi Korupsi Pajak	0,910	0,6	Reliabel
Motivasi Pajak	0,945	0,6	Reliabel
Insentif Pajak	0,947	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,883	0,6	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Menurut (Sufri & Pasaribu, 2023) nilai reliabilitas di bawah 0,6 dianggap kurang baik, nilai 0,7 dianggap cukup atau dapat diterima, dan nilai di atas 0,8 menunjukkan tingkat reliabilitas yang baik. Dapat dilihat dari tabel di atas tingkat reliabilitas semua variabel di atas 0,6 sehingga dapat disimpulkan reliabilitas masing-masing item dapat dikatakan berada ditingkat reliabilitas yang baik.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji statistik yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu sampel data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak (Candra & Wafa, 2023). Dalam penelitian ini, digunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* untuk menguji normalitas data. Data dianggap berdistribusi normal jika nilai signifikansi (sig) > 0,5.

Tabel 13. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.60606587
Most Extreme Differences	Absolute		.065
	Positive		.045
	Negative		-.065
Test Statistic			.065
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		.364
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.351
		Upper Bound	.376
a. Test distribution is Normal.			

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Diketahui nilai signifikansi berdasarkan tabel di atas adalah $0,200 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa semua data variabel berdistribusi normal.

Uji Multikoleniaritas

Multikolonieritas dapat dilihat dari *variance inflation factor (VIF)* dan uji toleransi. Semakin tinggi nilai VIF, semakin besar tingkat multikolinearitas dalam model. Sementara itu, semakin rendah nilai tolerance, semakin tinggi tingkat multikolinearitas antara variabel independen. Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai tolerance dan VIF adalah: jika nilai tolerance $\geq 0,1$ dan nilai VIF ≤ 10 , maka tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen. Sebaliknya, jika nilai tolerance $\leq 0,1$ dan nilai VIF ≥ 10 , maka dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

Tabel 14. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Persepsi korupsi	.971	1.030
	Motivasi	.988	1.012
	Insentif	.978	1.023
a. Dependent Variable: Kepatuhan UMKM			

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Hasil dari uji multikolinearitas di atas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan uji Glejser. Uji ini meregresikan variabel independen dengan nilai residual absolut. Jika nilai Sig. $> 0,05$, maka variabel-variabel dalam penelitian ini dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas.

Tabel 15. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	.519	.804		.646
	Persepsi korupsi	.040	.034	.120	1.176
	Motivasi	-.010	.026	-.038	-.376
	Insentif	.022	.024	.095	.932
a. Dependent Variable: ABS					

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Dapat diketahui dari hasil uji heteroskedastisitas di atas, semua variabel memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 artinya semua data variabel tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesa

Analisis Regresi Berganda

Tabel 16. Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
1					
	(Constant)	.735		1.404	.523
	Persepsi korupsi	.328	.059	.343	5.601
	Motivasi	.280	.045	.381	6.286
	Insentif	.418	.041	.616	10.099

a. Dependent Variable: Kepatuhan UMKM

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Berasarkan hasil dari analisis regresi berganda didapatkan persamaan sebagai berikut:
 $Y = 0,735 + 0,328 X_1 + 0,280 X_2 + 0,418 X_3 + e$

Dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 0,735 menunjukkan bahwa apabila variabel Persepsi Pajak (X_1), Motivasi Pajak (X_2), dan Insentif Pajak (X_3) dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y) tetap sebesar 0,735 satuan. Artinya, tanpa adanya pengaruh dari ketiga variabel independen tersebut, tingkat kepatuhan pajak masih berada pada nilai dasar 0,735.
2. Nilai koefisien sebesar 0,328 berarti setiap peningkatan satu satuan pada persepsi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,328 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak terhadap pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya.
3. Nilai koefisien sebesar 0,280 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada motivasi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,280 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Artinya, semakin tinggi motivasi seseorang untuk memenuhi kewajiban pajaknya, maka tingkat kepatuhan pajaknya juga meningkat.
4. Nilai koefisien sebesar 0,418 berarti setiap peningkatan satu satuan pada insentif pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,418 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh paling besar terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dibandingkan variabel lainnya.

Uji t

Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pada penelitian ini digunakan 5% (0,05) sebagai nilai signifikansi.

Tabel 17. Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
1					
	(Constant)	.735		1.404	.523

Persepsi korupsi	.328	.059	.343	5.601	.000
Motivasi	.280	.045	.381	6.286	.000
Insentif	.418	.041	.616	10.099	.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan UMKM					

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Hasil pengujian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persepsi Korupsi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji *t*, diperoleh nilai *t hitung* sebesar 5,601 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Jika dibandingkan dengan nilai *t tabel* pada tingkat signifikansi 5% yaitu 1,975, maka *t hitung* lebih besar daripada *t tabel* ($5,601 > 1,975$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Persepsi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Artinya, semakin baik persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan, maka tingkat kepatuhan pajak UMKM juga akan meningkat.

2. Motivasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji *t*, diperoleh nilai *t hitung* untuk variabel Motivasi Pajak adalah sebesar 6,286 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena *t hitung* lebih besar dari *t tabel* ($6,286 > 1,975$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa Motivasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini berarti semakin tinggi motivasi yang dimiliki wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka tingkat kepatuhan pajak UMKM juga akan semakin meningkat.

3. Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan tabel hasil uji *t*, diperoleh nilai *t hitung* sebesar 10,099 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena *t hitung* lebih besar daripada *t tabel* ($10,099 > 1,975$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Artinya, semakin besar insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM, maka akan semakin mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat tiga variabel bebas, yaitu Persepsi Pajak (X1), Motivasi Pajak (X2), dan Insentif Pajak (X3) terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diperoleh temuan mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat yang dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh Persepsi Korupsi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil dari analisis regresi nilai koefisien sebesar 0,328 berarti setiap peningkatan satu satuan pada persepsi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,328 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak terhadap pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya.

Pengaruh Motivasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil dari analisis regresi nilai koefisien sebesar 0,280 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada motivasi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,280 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Artinya, semakin tinggi motivasi seseorang untuk memenuhi kewajibannya, maka tingkat kepatuhan pajaknya juga meningkat.

Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil dari analisis regresi nilai koefisien sebesar 0,418 berarti setiap peningkatan satu satuan pada insentif pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,418 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh paling besar terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dibandingkan variabel lainnya.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Persepsi Korupsi Pajak (X1), Motivasi Pajak (X2), dan Insentif Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi Korupsi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,328, nilai t hitung 5,601 lebih besar dari t tabel 1,975, serta nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak UMKM. Hasil menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Motivasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini dibuktikan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,280, nilai t hitung 6,286 yang lebih besar daripada t tabel 1,975, serta nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya, semakin tinggi motivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, maka tingkat kepatuhannya juga semakin meningkat. Hasil menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,418, nilai t hitung 10,099 lebih besar dari t tabel 1,975, serta nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh paling besar terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan variabel lainnya. Pemberian insentif pajak mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi pelaku UMKM. Hasil menunjukkan bahwa hipotesis diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Airawaty, D., Setiorini, K. R., Arifah, S., Sari, Y. P., & Sujarweni, V. W. (2025). *Bisnis & Keberlanjutan: Strategi, Teknologi, Laporan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Alfian, N., Rohmaniyah, R., & Subhan, S. (2025). DAMPAK PERSEPSI KORUPSI PAJAK DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK DI PAMEKASAN). *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(1), 962–968. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.41726>
- Amah, N., Febrilyantri, C., & Lestari, N. D. (2023). Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 28(1), 1–19. <https://doi.org/10.24912/je.v28i1.1266>
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>

- Ariestiani, C. M., Agustin, P. A. S., & Kusuma, P. F. (2024). KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG DIPENGARUHI OLEH SANKSI PAJAK, MOTIVASI DAN TINGKAT PENDIDIKAN. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*, 2(2), 83–90. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.675>
- Bapperida. (2024). Jumlah Data UMKM Berdasarkan Wilayah di DIY. Retrieved March 28, 2025, from [jogjaprov.go.id](https://bapperida.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/107-umkm) website: https://bapperida.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/107-umkm
- Candra, Y. T. A., & Wafa, Z. (2023, March). *Pengaplikasian Statistika Penelitian dengan Software Statistik*. Jawa Timur: CV. Global Aksara Pers.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=4uB76IC_pOQC
- Danuwaskita, H. (2023, January 31). Pemkab Bantul Targetkan Pendapatan PBB-P2 2023 Rp51 Miliar. Retrieved April 24, 2025, from IDN TIMES Jogja website: <https://jogja.idntimes.com/news/jogja/hironymus-daruwaskita/pemkab-bantul-targetkan-pendapatan-pbb-p2-2023-rp51-miliar-c1c2>
- Deyganto, K. O. (2022). The effect of tax incentives practices on the sustainability of micro, small and medium enterprises in Ethiopia during the outbreak of corona virus pandemic. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 11(1), 8. <https://doi.org/10.1186/s13731-022-00194-8>
- Diningsih, A. R., Dimyati, M., & Sari, N. K. (2023). PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PAJAK, KEADILAN PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENERAPAN E-BILLING DAN KEWAJIBAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *RIEMBA - JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(1), 34–47. <https://doi.org/10.31967/riemba.v1i1.932>
- Fenny Zyahwa, Rachmat Pramukty, & Tri Yulaeli. (2023). Pengaruh Motivasi, Persepsi dan Pengetahuan Pajak terhadap Minat Pemilihan Karir di Bidang Perpajakan (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Ubhara Jaya). *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 211–229. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i1.106>
- Friscayuarisanti, F., Tanno, A., & Putri, A. (2023). Efek Moderasi Kesadaran dan Usia Wajib Pajak pada Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama di Pangkal Pinang). *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 894–899. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i3.662>
- Gultom, D., & Oktris, L. (2022). Trust in the Government, Tax Knowledge, Religiosity and Perceptions of Tax Sanctions on Tax Compliance. *Research Journal of Finance and Accounting*, 13(6), 38–51. <https://doi.org/10.7176/RJFA/13-6-04>
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. Wiley. Retrieved from

<https://books.google.co.id/books?id=A23uUgziTKAC>

- Henriette, G., & Erasashanti, Annathasia. P. (2023). ANALISIS PENGARUH INSENTIF PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN, DAN DIGITALISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI ERA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Maneksi*, 12(3), 573–580. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i3.1740>
- Herlina, S., & Rodiah, S. (2024). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Korupsi, Penegakan Hukum dan Sikap Rasional Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 250. <https://doi.org/10.29103/jak.v12i2.17887>
- Hermawan, S., & Hariyanto, W. (2022). *Buku Ajar Metode Penelitian Bisnis (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Sidoarjo: Umsida Press. <https://doi.org/10.21070/2022/978-623-464-047-2>
- Husaeri, N. S., & Utami, C. K. (2023). KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK DENGAN PERAN TAX AMNESTY SEBAGAI PEMODERASI. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1770–1782. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3252>
- Kusnadi, Parso, & Auliya, A. N. (2023). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 354–371. <https://doi.org/10.37012/ileka.v4i1.2203>
- Lestari, S. A., Susena, K. C., & Irwanto, T. (2023). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.3681>
- Lubis, S. A., & Sanulika, A. (2024). PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, SANKSI DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN PASIR PUTIH. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(1), 110–131. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i1.10>
- Maisyarah, R. (2024). An Implementation Of Government Regulation On Growth Levels And Mandatory Compliance MSME Tax. *Jurnal Scientia*, 13(03), 83–95. Retrieved from <https://seaninstitute.org/infor/index.php/pendidikan/article/view/2476>
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284.
- Muarifah, A. (2023). *Pengantar Psikologi* (N. Asri, Ed.). Bandung Barat: PT REMAJA ROSDAKARYA. Retrieved from <https://www.rosda.id/psikologi/pengantar-psikologi/>
- Mukoffi, A., Sulistiyowati, Y., Himawan, S., & Kontesa, K. (2022). Korupsi pajak dan keadilan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak (KPP) Batu. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 85–94. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i1.17339>

- Parengkuan, Y. W. C., & Nursyirwan, V. I. (2023). Pengaruh Pemahaman Aturan Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.35314/iakp.v4i1.3119>
- Pratiwi, A. D. S., & Sinaga, K. E. C. (2023). PENGARUH MOTIVASI, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA). *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 95–110. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v15i1.3162>
- Rahmawati, R., Handayani, S. R., Suprpti, A. R., Airawaty, D., & Latifah, L. (2023). Green Entrepreneurship Based On Local Characteristics and Culture To Support Sustainable Eco-Tourism: A Case Study. *Journal of Intercultural Communication*, 66–75. <https://doi.org/10.36923/jicc.v23i1.71>
- Rahmayanti, N. P., Arini, R. M., Indiraswari, S. D., & Dara, R. R. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Al-KALAM: JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN*, 10(2), 290. <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v10i2.11437>
- Ratnawati, V., Rusli, R., & Wahyuni, N. (2023). Determinants of tax compliance of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Pekanbaru, Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 21(3), 601–613. [https://doi.org/10.21511/ppm.21\(3\).2023.47](https://doi.org/10.21511/ppm.21(3).2023.47)
- Richard, & Lastanti, H. (2024). Peran Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i8.3447>
- Risa, N., Bilqis, G. D., & Susanti, N. L. (2023). Pengaruh Penerapan Insentif Pajak, Tax Literacy Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 14(1), 72–81. <https://doi.org/10.33558/jrak.v14i1.5842>
- Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- Riyanti, B., & Sudarmawanti, E. (2022). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Era New Normal Melalui Pemberian Insentif Pajak, Peningkatan Kondisi Keuangan Dan Kesadaran Pajak. *Owner*, 6(2), 2167–2179. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.826>
- Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2025). TEKNIK PENGUMPULAN DATA: OBSERVASI, WAWANCARA DAN KUESIONER. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 3(1), 39–47. <https://doi.org/10.61787/taceee75>
- Rosini, I. (2023). *Metode Penelitian Akuntansi Kuantitatif dan Kualitatif*. Tangerang Selatan:

Penerbit Adab.

- Safitri, R. N., & Afiqoh, N. W. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN, DAN MOTIVASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 165–177. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1233>
- Sari, P. I. P., Putri, E. A., Petra, B. A., & Dewi, R. C. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak, dan Persepsi Korupsi. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 594–605. <https://doi.org/10.37034/infec.v5i2.586>
- Simanjuntak, S. D., Lumbangaol, V. M., & Hutapea, H. D. (2025). Pengaruh Pengetahuan dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Kesadaran sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 125–139. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14657>
- Sufri, & Pasaribu, F. T. (2023). *Pengolahan Data Statistik Menggunakan SPSS*. Malang: PT, Literasi Nusantara Abdai Grup.
- Susanto, P. C., Arini, D. U., Yuntina, L., Soehaditama, J. P., & Nuraeni, N. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504>
- Susilowati, F. (2022). *Pengujian Statistik Dengan SPSS*. Magelang: Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Tahar, A., Yunianto, A., Sofyani, H., Simorangkir, P., Remalya, V. D., & Az-Zahro, S. F. (2023). The Impact of Perceptions of Corruption and Trust in Government on Indonesian Micro, Small and Medium Enterprises Compliance with Tax Laws. *Journal of Tax Reform*, 9(2), 278–293. <https://doi.org/10.15826/jtr.2023.9.2.142>
- Tahir, R., Suharman, P., & Purnamasari, D. (2023). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Jambi.
- Taufik, A. (2016). Pengaruh Postur Motivasi Ditinjau Dari Commitment, Capitulation, Resistance, Disengagement Dan Game Playing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1), 73–100.
- Valencia, & Mulyani, M. (2023). PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SAAT PANDEMI COVID-19. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 57–67. <https://doi.org/10.46806/ja.v12i1.983>
- Wadi, I., & Akbar, M. A. (2024). PENGARUH MOTIVASI, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PADA KPP PRATAMA DEPOK SAWANGAN. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(1), 138–147. <https://doi.org/10.37481/sjr.v7i1.790>
- widya, klarista, Maryani, M., & Makhsun, A. (2022). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan

Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(1), 41–54.
<https://doi.org/10.35912/rambis.v2i1.1047>